

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK



LAPORAN

PENDIDIKAN PEMILIH PEMULA BERKELANJUTAN

TAHUN 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Dasar Pelaksanaan	5
3. Tujuan	6
BAB II HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
A. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung.....	10
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
1. Kesimpulan Umum.....	30
2. Kesimpulan Saran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sudah berjalan selama 27 tahun pasca era reformasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin serta arah pembangunan bangsa melalui proses yang jujur, adil, dan transparan. Namun, kualitas dari sebuah pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana pemilih memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi tersebut. Dalam konteks inilah sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi sebuah kebutuhan yang krusial. Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan pemilih tidak hanya memberikan informasi tentang teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik, nilai demokrasi, serta kemampuan untuk menyaring informasi di tengah derasnya arus komunikasi digital.

Pada era informasi yang masif saat ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan baru yang berdampak langsung pada kualitas partisipasi politik. Kemudahan akses terhadap informasi-informasi melalui media sosial dan platform digital telah membawa manfaat besar dalam penyebaran pengetahuan, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi munculnya disinformasi, misinformasi, dan propaganda politik yang dapat menyesatkan pemilih. Kondisi ini berpotensi melemahkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi serta mempengaruhi keputusan politik mereka secara negatif. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tidak hanya berfokus pada memberikan pengetahuan dasar seputar pemilu, tetapi juga menumbuhkan kemampuan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis di kalangan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti pemilih pemula, masyarakat marginal, kelompok perempuan, atau komunitas tertentu, mengenai seluruh aspek Pemilu dan Pemilihan. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan lembaga penyelenggara pemilu, tahapan pelaksanaan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta bagaimana mengidentifikasi informasi hoaks terkait politik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan sikap positif pemilih terhadap proses demokrasi, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu

tidak hanya sekedar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi bentuk kesadaran politik yang matang.

Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga memiliki nilai strategis karena membantu membangun hubungan yang lebih erat antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi, bertanya, bahkan menyampaikan kritik atau masukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, sosialisasi ini bukan hanya bersifat satu arah, melainkan menjadi forum dialog yang konstruktif. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu serta memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan. Di dalam laporan ini, dipaparkan secara rinci latar belakang pelaksanaan kegiatan, tujuan yang ingin dicapai, metode sosialisasi yang digunakan, profil peserta, serta hasil yang diperoleh. Selain itu, laporan ini juga memuat evaluasi terhadap faktor pendukung dan hambatan yang ditemukan selama kegiatan berlangsung. Evaluasi ini menjadi bagian penting karena dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi yang lebih efektif pada kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berikutnya.

Secara khusus, laporan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian peserta masih memiliki keterbatasan dalam memahami informasi terkait tahapan pemilu maupun cara menentukan pilihan secara rasional. Hal ini memperkuat urgensi dilaksanakannya kegiatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, khususnya pada wilayah yang tingkat literasi politiknya masih rendah. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih dapat melakukan pilihan secara mandiri tanpa tekanan, intimidasi, atau pengaruh informasi palsu yang dapat menyesatkan.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menekan angka golongan putih (golput) dengan meningkatkan motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilih yang tinggi akan memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap hasil pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Lebih dari itu, pemilih yang teredukasi akan lebih mampu

mengawal hasil pemilu dan mengawasi kinerja lembaga serta pemimpin terpilih, sehingga proses demokrasi berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, penyusunan laporan ini tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi kegiatan, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan dasar pengembangan program pendidikan pemilih di masa mendatang. Harapannya, laporan ini dapat menjadi referensi bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan kegiatan serupa. Melalui kerja sama berkelanjutan, pendidikan pemilih diharapkan dapat menjadi gerakan bersama yang mendorong terciptanya pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas.

Laporan ini juga disusun untuk mendokumentasikan rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak di tahun 2025 sebagai bagian dari peningkatan literasi dan edukasi politik kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman tentang tahapan pemilu, pentingnya partisipasi, prinsip-prinsip dasar demokrasi, serta cara menilai informasi politik secara kritis di tengah maraknya disinformasi.

Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai, tantangan yang ditemui, serta rekomendasi untuk pengembangan program pendidikan pemilih di masa mendatang. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi pertanggungjawaban kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi guna memperkuat kualitas partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

C. Tujuan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan bagian penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini dirancang bukan sekadar untuk memberikan informasi teknis mengenai proses tahapan-tahapan pada Pemilu dan Pemilihan, tetapi juga untuk membangun kesadaran politik, meningkatkan partisipasi, serta memastikan bahwa setiap warga negara mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah uraian mengenai tujuan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang komprehensif.

1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang Proses Pemilu

Salah satu tujuan utama pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan pemilu. Masyarakat perlu memahami bagaimana proses pemilu dimulai, mulai dari pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Pemahaman terhadap proses ini dapat mengurangi kebingungan dan mencegah kesalahan prosedur ketika pemilih datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, semakin baik pengetahuan masyarakat, semakin kecil pula kemungkinan munculnya misinformasi yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.

2. Mendorong Partisipasi Politik yang Tinggi dan Berkualitas

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap proses politik. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat diingatkan mengenai pentingnya peran suara mereka dalam menentukan arah pembangunan bangsa dan daerah. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan bukan hanya meningkatkan angka partisipasi secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif, yaitu menjadikan pemilih lebih kritis dan sadar akan konsekuensi politik dari pilihan mereka.

3. Membangun Pemilih yang Cerdas dan Rasional

Tujuan penting lainnya adalah membentuk pemilih yang mampu mengambil keputusan secara rasional berdasarkan informasi yang akurat. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih menekankan pentingnya menilai rekam jejak kandidat, visi-misi, program kerja, serta integritas personal. Pemilih yang cerdas tidak mudah terpengaruh oleh kampanye negatif, provokasi, atau berita palsu. Ia juga tidak mudah terbujuk oleh praktik politik uang atau iming-iming jangka pendek. Sosialisasi yang baik membantu pemilih membedakan mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan.

4. Meminimalisir Politik Uang dan Praktik-Praktik Curang

Politik uang masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu di banyak daerah. Dengan memberikan pendidikan pemilih yang memadai, masyarakat diajak untuk memahami bahaya politik uang terhadap kualitas demokrasi. Mereka diberi pemahaman bahwa politik uang dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau tidak memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk memperkuat keberanian masyarakat melaporkan pelanggaran, sehingga praktik-praktik curang dapat ditekan secara signifikan.

5. Meningkatkan Kesadaran tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sosialisasi pemilu tidak hanya berfokus pada informasi teknis, tetapi juga pada edukasi mengenai posisi warga negara dalam sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih, namun hak tersebut datang bersama tanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif dan sadar. Pendidikan pemilih bertujuan menanamkan bahwa menggunakan hak pilih merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan bangsa. Masyarakat diajak untuk memahami bahwa suara mereka memiliki nilai dan harus digunakan secara bijaksana.

6. Memastikan Semua Kelompok Masyarakat Dapat Mengakses Informasi Pemilu

Sosialisasi dan pendidikan pemilih juga bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan informasi seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, , perempuan/ibu-ibu, dan warga marginal. Pendidikan pemilih yang inklusif memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap informasi penting mengenai pemilu. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dapat benar-benar mencerminkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

7. Menumbuhkan Budaya Demokrasi yang Berkelanjutan

Salah satu tujuan jangka panjang dari sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demokrasi bukan hanya tentang memberikan suara pada hari pemungutan, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Melalui pendidikan pemilih, masyarakat didorong untuk lebih kritis, lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, serta lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan politik di lingkungan mereka. Dengan demikian, kegiatan ini berperan dalam pembentukan budaya demokrasi yang kuat dan berkelanjutan.

8. Mengurangi Konflik Sosial dan Meningkatkan Kerukunan Antarwarga

Pemilu dan Pemilihan sering kali memicu perbedaan pendapat dan ketegangan di tengah masyarakat. Melalui sosialisasi, pemilih diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. Pendidikan mengenai etika berpolitik, toleransi, dan penggunaan media sosial yang bijak sangat penting untuk menjaga suasana pemilu tetap damai. Dengan adanya pengetahuan ini, pemilih diharapkan mampu menghindari konflik horizontal dan tetap menjaga harmoni sosial.

9. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pemilu

Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu menjadi kunci legitimasi pemerintahan yang terpilih. Sosialisasi pemilu memberi ruang bagi penyelenggara untuk menjelaskan mekanisme pengawasan, standar integritas, serta langkah-langkah antikorupsi yang diterapkan. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat melihat bahwa pemilu diselenggarakan secara adil dan profesional. Hal ini penting untuk mengurangi kecurigaan atau desas-desus negatif yang dapat merusak citra penyelenggaraan pemilu.

10. Memfasilitasi Masyarakat dalam Penggunaan Teknologi Pemilu

Di era digital, beberapa tahapan pemilu telah memanfaatkan teknologi, seperti sistem informasi data pemilih, aplikasi pengawasan, atau platform kampanye digital. Sosialisasi bertujuan untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut secara benar. Dengan demikian, proses pemilu menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Secara Langsung

- 1) **Sosialisasi kepemiluan ke mahasiswa Fakultas Hukum UNTAN** tanggal 23 April 2026 dengan segmen Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula. Narasumber Abdul Haris menyampaikan penyampaian sosialisasi dan edukasi kepada mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa dapat memahami makna hak pilih dan menjadi pemilih yang cerdas serta bertanggung jawab.

Dokumentasi :



2) **Sosialisasi Mahasiswa UNTAN tentang Kehumasan Bersama HUMAS KPU Kota Pontianak** tanggal 21 Mei 2026 dengan segmen Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula. Narasumber Abdul Haris menyampaikan bahwa Peran Humas dalam membangun komunikasi publik, penyebaran informasi kepemiluan hingga menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa dapat termotivasi dalam mengelola media social sebagai sarana informasi publik dan penyebaran informasi.

Dokumentasi :



- 3) **Pelatihan Panitia Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu (Universitas PGRI Pontianak)** tanggal 10 Juni 2026 dengan segmen Pendidikan Pemilih Pemula bagi pengurus DPM Universitas PGRI Pontianak. Pada kegiatan ini narasumber David Teguh menjelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu, tugas dan fungsi pengawasan serta mengajak para calon panitia untuk menjadi penyelenggara pemilu dilingkungan Universitas. Melalui Sosialisasi ini, KPU Kota Pontianak berharap pemilih pemula dapat lebih memahami peran KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada.

Dokumentasi :



- 4) **Sosialisasi Pendidikan Pemilih sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda** tanggal 19 Juni 2026. Kegiatan ini dibuka oleh David Teguh M. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan Pemilih sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Abdul Haris.

Dokumentasi :



- 5) **Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui kanal *Podcast*** sebagai upaya semangat pemilih pemula, siap jadi penentu masa depan dengan menghadirkan narasumber dari siswa SMA Negeri 1 Pontianak tanggal 26 Juni 2026. Kegiatan ini dipandu oleh Host Bapak U.M Ridwan dengan Narasumber siswa SMA Negeri 1 Pontianak, Josepha Alexandra Roxa Potifera dan Almira Khairunnisa. Podcast ini membahas bagaimana pandangan politik anak muda pada saat ini, cara mengajak anak muda untuk tidak apatis dalam pemilihan serta kekuatan satu suara anak muda yang dapat menentukan masa depan. Podcast ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam pemahaman dan pandangan pemilih pemula mengenai kepemiluan dan tata Kelola demokrasi di Indonesia. Sebagai calon pemilih, mereka wajib mengetahui tentang bagaimana kepemiluan, demokrasi dan politik.

Dokumentasi :



6) **Sosialisasi langsung tatap muka kepada Pemilih Pemula di SMK Negeri 4 Pontianak tentang Kepemiluan** tanggal 19 Agustus 2026 Narasumber Abdul Haris pemahaman yang memadai mengenai pentingnya demokrasi, kepemiluan, serta peran warga negara dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Kegiatan ini dihadiri oleh 100 siswa yang dapat memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, proses penyelenggaraan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Dokumentasi :



BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pemahaman Pemilih**

- a. Pengetahuan Pemilih (peserta pada saat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat memahami tentang materi-materi yang disampaikan antara lain: Tahapan Pemilu dan Pemilihan, Hak dan Kewajiban Pemilih, cara memilih yang benar serta fungsi lembaga dan jabatan yang dipilih);
- b. Sikap dan Kesadaran Politik (peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih memahami tentang kesadaran pentingnya pemilu, sikap positif terhadap demokrasi, Pemilu dan Pemilihan);
- c. Efektifitas Media Sosial KPU Kota Pontianak (Pemanfaatan media sosial serta tingkat pemahaman pesan yang disampaikan kepada pemilih dilihat dari interaksi dan umpan balik dari pemilih).

2. **Peran Strategi Sosialisasi yang Variatif**

Efektifitas strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih diukur melalui ketercapaian tujuan dan penggunaan sumber daya yang digunakan dalam strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan tolak ukur dilihat dari anggaran yang digunakan, jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta waktu dan sarana pendukung dengan menjalankan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih antara lain : konsisten dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, pada kegiatan tatap muka saat sosialisasi dan pendidikan pemilih berlangsung dilakukan dengan interaksi dua arah (diskusi dan tanya jawab) serta menyesuaikan materi yang disampaikan dengan kebutuhan pemilih.

3. **Tingkat Partisipasi Masyarakat**

Teman-teman Pemilih yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU Kota Pontianak menunjukkan antusiasme tinggi pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut, Hal ini terlihat dari kehadiran peserta dan partisipasi aktif pada saat kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Segmen Pemilih Pemula di Kota Pontianak menjadi sasaran utama KPU Kota Pontianak, pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tersebut dilakukan dengan metode yang efektif dengan pendekatan yang menarik dan dapat mudah dipahami antara lain ada diskusi

dan tanya jawab dan ice breaking bertema demokrasi dengan penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana dan lebih mudah dipahami oleh pemilih pemula.

4. Kendala dan Tantangan

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan sasaran utama segmen pemilih pemula yang dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak menghadapi berbagai tantangan antara lain minat yang kurang dari pemilih pemula terkait tentang kepemiluan serta metode yang digunakan pada saat kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan, maka dari itu diperlukan pendekatan yang kreatif, relevan, serta interaktif agar pesan yang disampaikan pada saat kegiatan dapat diterima dengan baik oleh Pemilih Pemula.

5. Rekomendasi

- Perlu penguatan program sosialisasi secara berkelanjutan agar informasi pemilu dapat diterima luas.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.
- Meningkatkan keterlibatan lembaga pendidikan dan komunitas lokal dalam penyebaran informasi pemilu.

Kesimpulan Umum

Sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan langkah penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi. Upaya berkelanjutan dan strategi yang inovatif menjadi kunci keberhasilan program ini.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program ini adalah:

1. Peningkatan Intensitas Sosialisasi

Sosialisasi sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang konsisten tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih.

2. Pemanfaatan Media Digital dan Teknologi

Menggunakan platform digital, media sosial, dan aplikasi berbasis daring untuk menyebarkan informasi pemilu. Cara ini efektif menjangkau generasi muda dan masyarakat yang apatis dengan metode tatap muka.

3. Pendekatan Partisipatif

Mengajak masyarakat untuk aktif terlibat melalui diskusi interaktif, kuis, atau simulasi pemungutan suara. Metode partisipatif ini lebih mudah dipahami dan meninggalkan kesan mendalam bagi peserta.

4. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

Melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal sebagai mitra sosialisasi dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan evaluasi berkala terhadap program sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk mengetahui efektivitasnya. Data dari evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki metode dan materi yang disampaikan.

6. Peningkatan Akses Informasi

Menyediakan materi informasi dalam berbagai format (cetak, audio, video) dan bahasa lokal agar masyarakat dengan tingkat literasi berbeda tetap dapat memahami informasi pemilu.

Kesimpulan Saran

Dengan menerapkan saran-saran di atas, program sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi.